

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA: TANTANGAN DAN UPAYA MEMPERKUAT SISTEM DEMOKRASI

Muhamad Allansyah Ramdhani, Rizka Triananda, Aos Kuswandi

Sistem Politik Indonesia, Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2026

Revised Juli, 2026

Accepted Juli, 2026

Available online Juli, 2026

Email: ramdhanialansyah@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

Abstrak

Politik di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kemajuan teknologi informasi. Dinamika tersebut memengaruhi cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik, mulai dari proses pemilihan umum, penyampaian aspirasi, hingga pembentukan opini di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan politik Indonesia serta berbagai faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi di tengah meningkatnya penggunaan media digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber terpercaya yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi di

Indonesia telah mengalami kemajuan dalam aspek partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti penyebaran disinformasi, polarisasi politik, praktik politik uang, serta rendahnya literasi politik di sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat, transparan, dan demokratis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi politik Indonesia sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Kata kunci: politik Indonesia, demokrasi, partisipasi politik, media digital, literasi politik.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Di Indonesia, demokrasi menjadi salah satu



prinsip utama dalam penyelenggaraan negara sejak era reformasi. Perubahan tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan lancar. Walaupun proses demokrasi, seperti pemilihan umum langsung, sudah menjadi bagian dari kehidupan negara, sejumlah tantangan tetap ada. Praktik politik uang, penyebaran informasi palsu, rendahnya literasi politik, dan meningkatnya polarisasi masyarakat merupakan beberapa masalah yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi turut mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan memperoleh informasi mengenai isu-isu politik. Namun, kemudahan tersebut juga membawa dampak negatif apabila tidak disertai dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

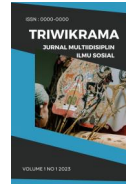
Sebagai negara demokrasi, Indonesia memerlukan partisipasi masyarakat yang tidak hanya tinggi dari segi jumlah, tetapi juga berkualitas. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan lebih mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perkembangan demokrasi di Indonesia beserta tantangan yang dihadapi agar dapat ditemukan upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia.
2. Menganalisis berbagai tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
3. Menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan menjadi acuan untuk studi lanjutan yang membahas tema serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya demokrasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab, serta menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam mendukung penguatan demokrasi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

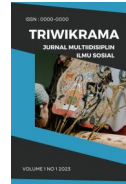
2.1 Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin melalui pemilihan umum, menyampaikan pendapat, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai proses memilih pemimpin, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak warga negara.

Menurut Miriam Budiardjo (2015), demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan penghormatan terhadap hukum.

Sementara itu, Robert A. Dahl (1989) menjelaskan bahwa demokrasi yang ideal diwujudkan melalui beberapa prinsip penting, seperti partisipasi warga negara, persamaan hak dalam memberikan suara, akses terhadap informasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan adanya pemilihan umum yang bebas serta adil. Menurut Dahl, kualitas demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan bernegara.

2.2 Demokrasi di Indonesia



Indonesia menganut sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi Indonesia menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama melalui musyawarah, penghormatan terhadap keberagaman, serta keadilan sosial.

Sejak Reformasi 1998, pelaksanaan demokrasi mengalami perubahan yang cukup besar. Pemilihan umum dilakukan secara lebih terbuka, masyarakat memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menyampaikan pendapat, dan media massa berkembang sebagai sarana pengawasan terhadap pemerintah. Meskipun demikian, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, polarisasi politik, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

2.3 Teori Demokrasi Robert A. Dahl

Robert A. Dahl mengembangkan konsep polyarchy, yaitu bentuk demokrasi yang dapat diterapkan dalam negara modern. Menurutnya, demokrasi yang baik tidak harus sempurna, tetapi harus mampu menjamin hak-hak dasar masyarakat dalam kehidupan politik.

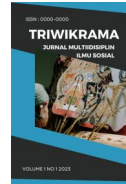
Dahl menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur utama dalam sistem demokrasi, yaitu:

- Partisipasi masyarakat dalam proses politik.
- Persamaan hak setiap warga negara dalam memberikan suara.
- Kebebasan menyampaikan pendapat.
- Akses terhadap informasi yang beragam.
- Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

Apabila unsur-unsur tersebut berjalan dengan baik, maka demokrasi akan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.4 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa mengikuti pemilu, bergabung dalam organisasi politik, menyampaikan aspirasi, hingga mengawasi jalannya pemerintahan.



Menurut Herbert McClosky (1972), partisipasi politik adalah kegiatan sukarela yang dilakukan warga negara dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Tingkat partisipasi masyarakat sering dijadikan salah satu indikator keberhasilan sistem demokrasi.

2.5 Tantangan Demokrasi Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah praktik politik uang yang dapat memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, perkembangan media sosial juga mempermudah penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi politik pada sebagian masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat menyebabkan partisipasi politik hanya didasarkan pada emosi atau informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, pendidikan politik dan literasi digital menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

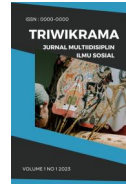
2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa demokrasi merupakan sistem yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kualitas demokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti partisipasi politik, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, dan akses terhadap informasi. Di sisi lain, tantangan seperti politik uang, polarisasi, dan penyebaran hoaks dapat menghambat terciptanya demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kondisi demokrasi Indonesia dengan menggunakan konsep demokrasi dari Robert A. Dahl dan teori partisipasi politik sebagai dasar analisis.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengkaji berbagai informasi secara mendalam tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.



3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder. Sumber tersebut meliputi buku-buku mengenai ilmu politik dan demokrasi, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan topik penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia, kemudian membaca, mencatat, mengelompokkan, dan membandingkan informasi dari setiap sumber. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan fokus penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

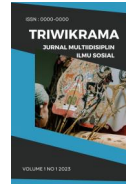
Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan mengumpulkan berbagai informasi dari sumber yang telah dipilih, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, tantangan yang dihadapi, dan upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi. Selanjutnya, data diinterpretasikan dengan mengacu pada teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami.

3.5 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya setelah era Reformasi. Fokus kajian meliputi pelaksanaan demokrasi, tingkat partisipasi politik masyarakat, tantangan yang memengaruhi kualitas demokrasi, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

3.6 Alur Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara bertahap. Peneliti terlebih dahulu menentukan topik dan merumuskan masalah penelitian. Setelah itu, peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang relevan, melakukan analisis terhadap data yang diperoleh,



kemudian menyusun hasil pembahasan berdasarkan teori yang digunakan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran yang dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak era Reformasi tahun 1998. Reformasi menjadi titik awal lahirnya sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, bebas, dan lebih transparan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers juga semakin berkembang sehingga masyarakat dapat lebih aktif menyampaikan kritik maupun aspirasi kepada pemerintah.

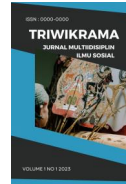
Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi praktik demokrasi di Indonesia. Media sosial kini menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi politik, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Di satu sisi, kondisi ini meningkatkan partisipasi publik karena informasi dapat diakses dengan lebih mudah. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial juga memunculkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.

4.2 Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Teori Robert A. Dahl

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi yang baik ditandai dengan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selain itu, masyarakat harus memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan memilih pemimpin melalui pemilu yang jujur dan adil.

Jika dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, beberapa prinsip tersebut telah diterapkan. Masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin secara langsung, mendirikan organisasi politik, dan menyampaikan aspirasi melalui berbagai media. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah berkembang dibandingkan dengan masa sebelum Reformasi.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip demokrasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih ditemukan praktik politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, serta penyebaran informasi yang tidak benar selama proses politik berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya



bergantung pada adanya pemilu, tetapi juga pada kesadaran seluruh pihak untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.

4.3 Tantangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu tantangan yang paling sering ditemui adalah praktik politik uang. Dalam beberapa kasus, pilihan masyarakat masih dipengaruhi oleh pemberian uang atau barang sehingga keputusan politik tidak sepenuhnya didasarkan pada kualitas calon pemimpin.

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi politik. Sebagian masyarakat masih kesulitan membedakan informasi yang benar dengan informasi yang menyesatkan. Akibatnya, hoaks dan disinformasi sering kali menyebar dengan cepat, terutama menjelang pemilihan umum.

Selain itu, polarisasi politik juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Perbedaan pilihan politik terkadang berkembang menjadi konflik di masyarakat maupun di media sosial. Apabila kondisi ini terus berlanjut, persatuan masyarakat dapat terganggu dan kualitas demokrasi menjadi menurun.

4.4 Upaya Memperkuat Demokrasi Indonesia

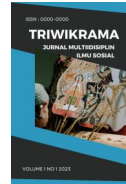
Penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pendidikan politik sejak dini agar masyarakat memahami hak, kewajiban, dan pentingnya berpartisipasi secara bertanggung jawab.

Peningkatan literasi digital juga menjadi hal yang penting di era perkembangan teknologi informasi. Dengan kemampuan menyaring informasi secara kritis, masyarakat akan lebih mampu membedakan berita yang benar dari informasi palsu sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya.

Selain itu, pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu perlu terus meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan umum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti politik uang dan penyebaran hoaks, juga harus dilakukan secara tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi tetap terjaga.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif setelah era Reformasi.



Masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sementara kebebasan berpendapat dan kebebasan pers semakin terjamin.

Namun, kualitas demokrasi tidak dapat diukur hanya dari terselenggaranya pemilu secara rutin. Demokrasi yang sehat juga memerlukan partisipasi masyarakat yang sadar, penegakan hukum yang adil, pemerintahan yang transparan, serta budaya politik yang menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, upaya memperkuat demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga negara, media, organisasi masyarakat, dan seluruh warga negara.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada serta menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk membangun sistem demokrasi yang semakin matang, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan.

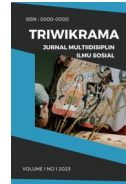
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama sejak era Reformasi. Perubahan tersebut terlihat dari semakin terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, pelaksanaan pemilihan umum yang lebih demokratis, serta meningkatnya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik politik uang, penyebaran hoaks, polarisasi politik, serta rendahnya literasi politik di sebagian masyarakat masih menjadi hambatan dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi tidak hanya bergantung pada terselenggaranya pemilu, tetapi juga pada kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik.

Berdasarkan teori demokrasi Robert A. Dahl, Indonesia telah memenuhi beberapa prinsip demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih perlu terus diperkuat agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung penguatan demokrasi di Indonesia.

1. Pemerintah perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi semakin meningkat.
2. Lembaga penyelenggara pemilu diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran, seperti politik uang dan penyebaran informasi yang menyesatkan, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih jujur dan adil.
3. Masyarakat diharapkan lebih aktif meningkatkan literasi politik dan literasi digital agar mampu memahami informasi secara kritis, tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, serta dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan mengenai demokrasi di Indonesia dengan menggunakan data lapangan, survei, atau studi kasus sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- McClosky, H. (1972). "Political Participation." *International Encyclopedia of the Social Sciences*.
- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu melalui pendidikan demokrasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1), 60-68. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766>
- Gina, A. (2023). Partisipasi politik perempuan dan kelompok muda dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 28(2), i-x.
- Mukti, F. W. (2022). Partisipasi politik pemilih pemula dalam mewujudkan negara demokratis. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(2), 94-103. <https://doi.org/10.35194/jpphk.v12i2.2294>
- Populi, D. (2022). Generasi rasional-demokratis: Proyeksi partisipasi memilih kaum muda. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 144-158. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.213>